

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu perusahaan atau organisasi dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan, itu dengan dilihatnya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting nya yaitu ada pada sumber daya manusia nya. Kinerja pegawai yang baik, itu dapat diukur dengan melihat hasil yang telah diperoleh dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Kinerja pegawai inilah yang nantinya akan memberikan pengaruh positif untuk perusahaan, apabila kinerja pegawai nya semakin baik maka akan baik juga untuk perusahaan, begitupun sebaliknya.

Dalam pelaksanaan pengendalian ini, pihak manajemen dapat membentuk departemen audit intern yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian pada pengendalian intern perusahaan tersebut. Struktur pengendalian intern ini dimaksud untuk melindungi harta milik perusahaan, menilai dari kecemasan dan keandalan suatu data akuntansi, dapat meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong penerapan kebijaksanaan manajemen yang telah ditentukan.

Peran audit internal akan semakin dapat diandalkan dalam pengembangan dan penjagaan efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan resiko dan *Good Corporate Governance* hal ini untuk mewujudkan suatu perusahaan yang sehat. Suatu mekanisme dalam pengendalian internal yaitu sebagai salah satu sarana utama guna memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance (GCG) atau yang biasa dikenal secara umum yaitu tata kelola perusahaan yang baik sebagai salah satu pilihan yang bukan hanya mengandalkan formalitas, melainkan suatu sistem yang dapat menilai dan *best practices* yang sangat *fundamental* bagi peningkatan nilai perusahaan. Dalam suatu organisasi harus memiliki fungsi pengawasan dan pengelolaan yang harus dilakukan secara baik. Tata Kelola Perusahaan adalah suatu metode untuk mengatur perusahaan agar tetap mengikuti undang-undang ataupun kebijakan yang telah ditetapkan pada perusahaan tersebut, baik itu tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Prinsip tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik (*Good Corporate Governance*) pada era digital saat ini tentunya bukan hanya sebagai alat bantu kerja saja, namun sudah masuk ke ranah strategi bisnis, maka pengambilan keputusan dan pengawasan pun telah menjadi agenda penting dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan. Tata kelola yang baik itu adalah kebutuhan yang penting dalam bisnis untuk mendapatkan tujuan dan kebutuhan bisnis perusahaan.

Dalam perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memegang peranan sangat penting, dalam menopang keuangan Negara, maupun melayani peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. BUMN memiliki tujuan yang mana, dalam menghadapi persaingan global yang semakin pesat diharapkan mampu menaikkan efisiensinya, sehingga dapat menjadi unit usaha yang sehat. Kinerja pada BUMN sendiri sudah cukup baik, dengan menjadi penghasil laba terbesar dimana dapat mendukung percepatan pembangunan di Indonesia.

“Pemerintah melalui Kementrian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* ini dilingkungan BUMN, sebagai salah satu upaya untuk mendukung pencapaian penerapan/pendapatan Negara, sekaligus menghapuskan berbagai bentuk praktik inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan lainnya untuk memperkuat daya saing BUMN menghadapi pasar global” (Dilla, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER01/MBU/2011 pemerintah telah mewajibkan penerapan tata kelola pada Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, penerapan GCG ini telah menjadi kebutuhan yang nyata bagi peningkatan kinerja BUMN. *Good Corporate Governance* juga menegaskan filosofi bahwa pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari berdirinya perusahaan dan oleh karena itu semua pihak yang terlibat harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan perbaikan perusahaan. Karena GCG sendiri pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Implementasi *Good Corporate Governance* dapat diwujudkan melalui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang telah disepakati dalam (Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, tanggal 1 Agustus 2011) yaitu mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

1. Fenomena pertama, yang mengindikasikan pada audit umum mengalami kurangnya keterbukaan (*transparancy*) oleh PT Kereta Api Indonesia menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan, dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak melakukan salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik dapat terjadi, dikarena PT KAI sendiri tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. (Ekap Nugraha Agung, 2012).
Manipulasi Laporan Keuangan PT. KAI. Dalam kasus ini, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini merupakan suatu bentuk penipuan atau kecurangan yang dapat menyesatkan investor dan *stakeholder* lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadinya manipulasi data dalam laporan keuangan, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci lagi, perusahaan seharusnya mengalami kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Kasus yang dialami oleh audit umum pada PT. KAI ditahun 2005 ini juga, termasuk salah satu penyebabnya kesalahan auditor internal yang tidak dapat berperan aktif dalam proses pengauditan. Hal ini, membuat PT. KAI pada tahun 2012 menjadi salah satu perusahaan dari daftar 24 perusahaan BUMN yang berpotensi terkorup dan menduduki peringkat ke-19. Tempo (www.id.berita.yahoo.com).

2. Fenomena kedua, yaitu pada PT. Angkasa Pura I (Persero) terjadi pada penerapan tata kelola yang kurang baik. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa beban utang perusahaan pelat merah terus meningkat. Kali ini terjadi pada pengelolaan bandara PT Angkasa Pura I (AP I). Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmojo, mengatakan bahwa perusahaan ini tengah menanggung beban utang yang tinggi yaitu mencapai Rp 35 triliun. Jika hal ini terus dibiarkan, maka beban utang tersebut akan terus meningkat hingga Rp 38 triliun. “Di AP I, memang kondisinya berat dengan utang Rp 35 triliun dan *rate loss* per bulan Rp 200 miliar dan setelah pandemi, utang bisa mencapai Rp 38 triliun,” kata Kartika dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (2/12/2021). Hal ini dapat terjadi akibat bertambahnya beban perusahaan setelah dibukanya bandara baru, seperti *New Yogyakarta* yang baru dibuka tak lama sebelum pandemi terjadi. Saat ini AP I tengah melakukan rasionalisasi dan efisiensi dari beban keuangannya ini dan diharapkan bisa rampung pada Januari 2022 mendatang. Untuk diketahui Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau *New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA)* di Kulon Progo. Bandara ini memakan anggaran hingga Rp 11,3 triliun. Namun, saat ini bandara tersebut akan sepi layaknya Bandara Internasional Jawa Barat di Majalengka, Jawa Barat.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20211202171611->

[17296229/wah-masalah-baru-nih-angkasa-pura-i-terlilit-utang-rp-35-t](https://www.cnbcindonesia.com/market/20211202171611-17296229/wah-masalah-baru-nih-angkasa-pura-i-terlilit-utang-rp-35-t)

3. Fenomena ketiga yaitu pada Perusahaan Umum DAMRI (BUMN), yang terjadi ketidak terbukaannya informasi dan pertanggungjawaban mengenai gaji pegawai. Hal ini menyebabkan banyaknya pegawai menuntut akan hal itu, pasalnya selama 14 lamanya mereka tidak menerima gaji. Sekretaris Serikat Pekerja Damri Cabang Logistik, Setioso menjelaskan 85 pegawai tersebut belum menerima upahnya sejak November 2020. Setioso menyampaikan total upah yang belum terbayarkan mencapai sekitar Rp 2.9 miliar. "Kami sejak November 2020 hingga kini hanya beberapa kali mereka menerima pembayaran gaji, yakni pada saat pergantian dari General Manager lama ke Plt General Manager," kata Setioso kepada wartawan, Minggu (19/6/2022). Setioso menjelaskan perusahaannya menunda pembayaran gaji lantaran adanya sejumlah alasan yang menimbang situasi dan kondisi yang tengah marak. Akan tetapi, lanjut Setioso, alasan tersebut didengungkan selalu seperti adanya masalah manajemen dan lainnya. "Ada beberapa alasan (Damri), memang (pandemi) Covid-19. Covid-19 jadi alasan utama, juga (masalah manajemen)," ucap Setioso. Akan tetapi, Setioso dan koleganya merasa alasan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat diterima. Pasalnya, meski mengaku sedang mengalami pandemi, Setioso beserta 85 pegawai lainnya tetap diminta masuk kerja ke kantor sejak tahun 2020. Kendati demikian, Setioso mengaku perwakilan pekerja Damri Logistik telah menerima ajakan musyawarah guna membahas

masalah upah yang belum terbayarkan pada Jumat sebelumnya (10/6/2022 di kantor pusat Damri, Kecamatan Matraman. Namun, lanjut Setioso, belum ada hasil yang disepakati hingga mencapai kata puas. Setioso mengatakan hingga kini Serikat Pegawai Damri Cabang Logistik tetap membuka peluang menyelesaikan masalah secara musyawarah tanpa melakukan aksi mogok. Untuk itu, Setioso mewakili koleganya meminta pihak manajemen Damri Logistik segera menyampaikan jawaban atas pembayaran 85 gaji pegawai tersebut. "Jawaban surat itu adalah UUDP ketidakmampuan perusahaan untuk membayar gaji sehingga meminta ditalangi atau dibantu kantor pusat," tegas Setioso. Saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak Damri Logistik masih belum memberikan tanggapan. Adapun yang dihubungi adalah Dirut Damri Milatia dan Humas Damri Atikah Abdullah.

(<https://www.idxchannel.com/economics/miris-puluhan-pegawai-damri-logistik-tak-terima-gaji-setahun-lebih>)

Melihat kasus-kasus di atas, bahwa seorang komite audit dan audit internal itu sangat berperan aktif dalam mendeteksi, mencegah, dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan adanya tindakan pidana kecurangan seperti itu. Dengan begitu, seorang auditor internal harus melakukan pekerjaannya dengan benar, dan harus menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk auditor internal untuk memperlihatkan seberapa besar tanggung jawab yang harus dilakukan.

Pada *Good Corporate Governance*, peran komite audit merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat berjalan dengan baik nya atau tidak suatu perusahaan. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi keuangan, memastikan perusahaan tetap dijalankan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki etika yang baik.

Seorang audit internal itu harus memiliki tanggung jawab, seperti yang dijelaskan pada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:257), menjelaskan bahwa Auditor internal bertanggungjawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

Dengan begitu, hubungan antara komite audit dan audit internal untuk mewujudkan GCG di perusahaan. Dengan adanya kasus di atas, yang terjadi akibat adanya kesalahan dalam peranan komite audit dan pelaksanaan audit internal. Menjadikan banyaknya pihak luar bertanya tentang manakah peran komite audit atau satuan dari pengawasan intern ketika terjadi adanya penyimpangan dan pelanggaran, atau bagaimanakah fungsi dari audit internalnya sendiri sehingga bisa tetap berjalan dalam kondisi tersebut yang tidak terdeteksi dengan melakukan tata kelola yang yang baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh, Rama Suita, Hendra Gunawan, Pupung Purnamasari (2015) dengan judul

“Pengaruh Peran Komite Audit dan Pelaksanaan Audit Internal dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (pada perusahaan BUMN di Kota Bandung).”

Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu pada waktu, tempat, dan dimensi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 pada PT Kereta Api Indonesia, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan pada penelitian tidak menggunakan simultan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Pengaruh Efektivitas Peran Komite Audit Dan Pelaksanaan Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance***”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih ada perusahaan yang kurang baik dalam keterbukaan (*transparancy*) dalam memberikan informasi.
2. Masih ada perusahaan yang kurang baik dalam melakukan pertanggungjawabannya terhadap tugas dan fungsinya.
3. Masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan GCG dengan baik pada perusahaannya, sehingga masih banyak masalah-masalah yang bisa saja terjadi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peran Komite Audit pada PT Kereta Api Indonesia.
2. Bagaimana Pelaksanaan Audit Internal pada PT Kereta Api Indonesia.
3. Bagaimana *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia.
4. Seberapa besar pengaruh Efektivitas Peran Komite Audit terhadap *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia.
5. Seberapa besar pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari hasil identifikasi masalah penelitian di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Peran Komite Audit pada PT Kereta Api Indonesia
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Audit Internal pada PT Kereta Api Indonesia
3. Untuk mengetahui *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Efektivitas Peran Komite Audit terhadap *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance* pada PT Kereta Api Indonesia

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya, sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Adanya dengan penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang audit, khususnya mengenai pengaruh efektivitas peran komite audit dan pelaksanaan audit internal terhadap *good corporate governance*. Penulis berharap juga, dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat sidang skripsi untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi serta memberikan kegunaan dalam menambah ilmu dan wawasan mengenai pengaruh efektivitas peran komite audit dan pelaksanaan audit internal terhadap *good corporate governance*.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi sebagai bentuk referensi sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi auditor internal sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan kualitasnya.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk pembelajaran ataupun sebagai penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pengaruh efektivitas peran komite audit dan pelaksanaan audit internal terhadap *good corporate governance*. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi mahasiswa di bidang akuntansi.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi atau sebagai gambaran besar untuk penelitian yang ingin mengembangkan mengenai pengaruh efektivitas peran komite audit dan pelaksanaan audit internal terhadap *good corporate governance*.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kota Bandung. Adapun penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.